

Daya Saing Lulusan FH Tinggi

JOGJA--Daya saing lulusan Fakultas Hukum (FH) di Indonesia cukup tinggi. Bahkan permintaan terhadap lulusan Fakultas Hukum dapat dikatakan banyak dan stabil.

Menurut data (2003), setidaknya terdapat 200 Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing Fakultas Hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswanya.

"Dalam satu tahun ada sekitar 20.000 sarjana hukum baru se-Indonesia," ujar Koordinator Kopertis Wilayah V DIY, Dr Ir Bambang Supriyadi CES DEA dalam Seminar Nasional "Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Hukum Melalui Kerjasama dalam Pengembangan Sistem Informasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (24/3).

Menurut Bambang, meski daya saing tinggi diperlukan upaya peningkatan kompetensi lulusan Sarjana Hukum. Sehingga PT mampu memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Salah satunya dengan menam-

bah ketrampilan lulusan dengan Teknologi Informasi (TI). Sebab TI menjadi salah satu instrumen efektif dalam perdagangan global.

Apalagi perkembangan semakin viral dalam menghadapi daya saing MEA. Sebut saja adanya aplikasi online seperti taksi online maupun gojek.

"Perkembangan TI menjadi berkah tersendiri untuk ekonomi baru yang lebih efisien, inovatif, dan bisa dijangkau untuk semua lapisan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu perkembangan TI tersebut juga memunculkan kegiatan cyber yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Hal itu menandakan masyarakat dunia telah memiliki dunia baru yang bisa disebut dengan era digital. Era digital yang ditandai dengan akses barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan.

Di sisi lain, menghadapi kema-

juan teknologi tersebut juga diperlukan keamanan cyber, namun hingga kini masih banyak orang yang belum terlalu mempedulikan keamanan cyber tersebut.

"Perguruan Tinggi hukum bisa memberikan peran yang lebih untuk menangani kejahatan cyber di tengah era digital yang semakin maju ini," tandasnya.

Bambang menambahkan, perkembangan TI yang menjadi instrumen perdagangan global, tetap harus diberi pengamanan. Pengamanan pada cyber ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, sosial budaya dan etika, serta pendekatan hukum.

Dia berharap dalam menghadapi era digital dan MEA ini, Perguruan Tinggi bidang Hukum dapat berperan aktif dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia di bidang hukum.

"Kampus harus berperan mencetak lulusannya yang lebih unggul di bidang hukum, tapi juga tidak ketinggalan dengan perkembangan Teknologi, sehingga akan lebih mudah berkiprah di dalam negeri maupun di lingkungan ASEAN," tandasnya. (ptu)